

KOMODIFIKASI PEREMPUAN: Tapak Ekonomi Neoliberal

*Alia Swastika**

Abstract

Economic advancement offered on the name of women emancipation turned to be tricky. On the one hand it allows women to leave its marginal position, yet the progress leave the women with dehumanization as neoliberal treat them as commodity. The prospect for woman participation in economy is rest on the ideological strength revived by feminism.

Kata-kata kunci: *neoliberalisme; feminisme; komodifikasi*

Kebanyakan perempuan di negara berkembang (atau dalam sebuah istilah populer lain yang terkesan lebih mengejek, "negara dunia ketiga") hidup di tengah kondisi yang menghadirkan di depan mereka beragam paradoks, yang erat kaitannya dengan peranan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dan jejaring globalisasi—yang mewujud dalam praktik ekonomi neoliberal—menghampar di depan mereka dengan gerak yang halus dan gesit, bagai bayang-bayang hitam yang tak bisa mereka kenali namun terus

* *Alia Swastika* adalah pemerhati masalah perempuan, lulus dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2002, sekarang menjadi editor di KUNCI Cultural Studies Center, Yogyakarta.

mengikuti. Para perempuan dunia ketiga ini hidup di dalamnya, turut menjalin rantai-rantainya, tapi tak pernah sungguh-sungguh bisa menerka posisi mereka, apalagi mengajukan posisi tawar yang membuat mereka bisa mengambil keuntungan dari apa yang disebut sebagai sistem pergerakan dunia yang paling mutakhir ini.

Beberapa data yang ada menggambarkan kenyataan bahwa saat ini praktik ekonomi neoliberal semakin mempertinggi kesenjangan hidup antarmanusia— hanya ada seperlima penduduk bumi yang menikmati 80 persen dari pendapatan dunia (*The Independen*, 18 Maret 2002). Khusus dalam kaitannya dengan perempuan, penulis mendapatkan data bahwa dari seluruh aset dunia hanya ada 1 persen yang tercatat atas nama perempuan. Sementara dari 1, 2 miliar penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan akut, 70 persen di antaranya adalah perempuan. Di dunia, ada 855 juta orang yang buta huruf, 70 persen di antaranya adalah perempuan (*Media Kerja Budaya*, edisi 08/2002).

Mungkin ada baiknya jika disajikan beberapa paradoks yang berkaitan dengan relasi perempuan dan neoliberalisme ini. Paradoks *pertama* dapat dilihat dari sisi peranan mereka sebagai pelaku ekonomi dan hubungannya dengan negara. Satu kasus yang menonjol adalah pada pengalaman para pekerja perempuan di luar negeri. Di satu sisi, setiap tahun terjadi peningkatan yang terus menerus dari jumlah perempuan yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Dan tentu saja, peningkatan jumlah ini akan digambarkan dengan angka dan statistik yang menunjukkan peningkatan jumlah devisa negara dari sektor ini. Setidaknya, para "pahlawan devisa" ini menyumbang lebih dari US \$ 9 juta per tahun. Sementara di sisi yang lain, sumbangan penghasilan yang besar ini tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan keamanan dan kesejahteraan yang cukup dari pemerintah (pihak yang secara langsung menikmati jerih payah dan kerja keras para perempuan ini). Media massa cukup sering memuat berita tentang perkosaan atau tindak kekerasan lain—bahkan juga pembunuhan—yang dialami para pekerja perempuan di luar negeri ini.

Paradoks yang *kedua* terlihat dari peranan mereka sebagai pelaku ekonomi dan kaitannya dengan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat tentang perempuan. Di satu sisi, tampak jelas

bagaimana peningkatan kontribusi perempuan dalam perekonomian keluarga. Sekarang ini, lebih banyak keluarga yang menyandarkan jalannya perputaran roda ekonomi rumah tangga pada penghasilan suami dan istri, ketimbang jumlah keluarga yang mengandalkan sang suami semata. Para perempuan—dalam kasus ini terutama perempuan kelas bawah, ketika pekerjaan bukan lagi persoalan pilihan, melainkan sebuah keharusan yang tak bisa ditawar—turut keluar dari dapur dan rumah (yang pada masa lalu identik dengan wilayah perempuan), bekerja membanting tulang dengan berjualan di pasar, menjadi buruh di perusahaan dan pabrik-pabrik, atau menjadi pembantu rumah tangga di keluarga-keluarga kaya dan menengah. Di sisi yang lain, peningkatan peran mereka dalam hal penyediaan kebutuhan rumah tangga ini tidak dibarengi dengan semakin luasnya ruang yang diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan diri mereka. Kebanyakan keluarga masih memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak lelaki, sehingga banyak perempuan dari kelas ini memasuki lapangan kerja tanpa memiliki modal pendidikan yang memungkinkannya bersaing dengan para pencari kerja lelaki. Data yang ada menunjukkan lebih dari separuh perempuan di seluruh dunia yang berusia di atas lima belas tahun tidak bisa membaca dan menulis, padahal pada usia itulah perempuan mulai memasuki angkatan kerja.

Paradoks ketiga bisa dijumpai dalam hal upah. Tak satupun negara di dunia yang memberi upah setara antara laki-laki atau perempuan. Meskipun jumlah perempuan yang bekerja di sektor-sektor publik ini bertambah dalam angka yang cukup signifikan—khusus untuk kasus Indonesia, bandingkan saja kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata angkatan kerja perempuan yang mencapai 5,5 persen sementara laki-laki hanya 3,5 persen (Candraningsih, 1997)—akan upah yang mereka terima selalu lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada beberapa kasus, terutama di sektor industri, harus dicatat bahwa para majikan lebih membutuhkan pekerja perempuan untuk bidang-bidang yang tidak membutuhkan keterampilan, atau pekerjaan dengan produktivitas rendah, dan dengan alasan ini mereka merasa berhak untuk membayar perempuan dengan harga yang rendah. Para pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan-perusahaan transnasional

hanya menjadi "bulan-bulanan" modal karena tenaga mereka diperas demi menghasilkan dolar-dolar bagi pengusaha asing.¹

Tiga kasus di atas hanya contoh di antara sekian banyak paradoks yang muncul dari praktik neoliberalisme dalam kaitannya dengan perempuan. Dalam beberapa dekade terakhir, terutama pada masa-masa sebelum krisis melanda dunia—Asia khususnya—tampak bagaimana persoalan kemakmuran atau pertumbuhan ekonomi selalu digelar dalam angka-angka, yang semuanya seolah menunjukkan indikasi yang positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi makin bisa dikendalikan, jumlah pendapatan perkapita meningkat, dan pelbagai catatan ekonomi lainnya. Namun di tengah era yang disebut sebagai era pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran tersebut, perempuan justru menjadi "korban" dari semua proses ini. Menjadi "korban" di sini bukan sekadar dalam lingkup ekonomi dan pengembangan sumber daya—seperti ketiga contoh yang tersebut tadi—melainkan juga dalam pelbagai ranah kehidupan sehari-hari, mulai dari makin seringnya perempuan dijadikan objek industri pornografi, semakin meningkatnya tindak kekerasan dan pelecehan seksual hingga begitu sedikit dan tak diacuhkannya fasilitas kesehatan yang menunjang reproduksi perempuan. Tata ekonomi dunia baru ini tampaknya memang berdiri di atas penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan para perempuan miskin di pelbagai belahan dunia.

Beberapa Persoalan Perempuan dalam Kaitannya dengan Neoliberalisme

Asia bersama Afrika selama beberapa puluh tahun ini menjadi arena perebutan kekuasaan modal bagi ratusan perusahaan

¹ Para buruh perempuan ini dibayar kira-kira 7 sampai 8 ribu rupiah perhari, dengan lama kerja delapan jam per hari. Bandingkan dengan bayaran kontrak Michael Jordan, atlet bola basket Amerika yang menjadi bintang iklan—dan sekaligus semacam "maskot"—bagi perusahaan sepatu olah raga terkenal, Nike, yang besarnya 20 juta dola per tahun. Nilai ini sama dengan bayaran yang diterima seluruh buruh salah satu pabrik sepatu karet di Indonesia selama setahun (LaFeber, 2003)

transnasional, telah mengalami jatuh bangun perekonomian dari masa ke masa. Tahun-tahun 1970-an hingga pertengahan 1990-an bahkan tampak sebagai masa keemasan negara-negara Asia. Sesuai berakhirnya perang dingin, beberapa negara Asia mulai membuka lebar-lebar pintunya untuk para pemodal asing, dan dari sini perekonomian mulai bergerak, pembangunan dimulai dalam skala besar. Pada dekade 1980-an, Asia bahkan disebut sebagai pusat perkembangan dunia, namun ironisnya jumlah perempuan yang paling miskin justru mencapai angka tertinggi di Asia. Jadi, "feminisasi kemiskinan" merupakan masalah yang paling mendesak bagi (perempuan) Asia, lebih dari masalah-masalah lainnya. Yayori Matsui (2002) menceritakan bagaimana perempuan negara berkembang berusaha menjawab persoalan "Apakah penyebab kemiskinan itu, dan siapakah yang harus bertanggung jawab?" dalam konferensi perempuan se-dunia di Beijing, pada 1995.²

Menurut Matsui, para perempuan ini menuduh institusi-institusi internasional yang melakukan kerja sama dengan pemerintah tempat mereka hidup. Setelah kaum neoliberal berhasil melakukan lobi untuk dapat menerapkan "pasar bebas" dalam transaksi ekonomi, maka kerjasama antara institusi ekonomi internasional dengan negara terjalin semakin kuat. Sebagian besar pemerintah di negara berkembang melaksanakan program-program pembangunan dengan bergantung pada utang luar negeri. Institusi-institusi internasional ini memaksa negara-negara debitor untuk menyesuaikan struktur ekonominya guna membayar kembali hutang-hutangnya. Pemerintah negara-negara berkembang dipaksa memangkas anggaran kesejahteraan sosialnya, melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan negara, dan melakukan PHK terhadap para pekerja (yang sebagian besar korbannya adalah perempuan). Walaupun yang menjadi korban PHK adalah laki-laki, pada akhirnya,

² Yayori Matsui adalah seorang aktivis perempuan yang pertama kali merasa tertarik dengan isu-isu perempuan Asia karena pekerjaannya sebagai wartawan Asahi Shimbun. Pada saat itu, ia adalah satu-satunya wartawan perempuan di media tersebut. Awalnya, ia menulis laporan tentang masalah-masalah serius yang disebabkan oleh pertumbuhan pesat ekonomi pada 1960-an. Matsui melihat bahwa mereka yang paling menderita karena proses-proses industrialisasi dan pembangunan tersebut adalah perempuan.

perempuan juga yang menjadi korbannya karena kebanyakan lelaki meninggalkan perempuan begitu saja dengan anak-anak mereka jika tak sanggup menanggung beban hidup.

Selain itu, para perempuan ini juga menuduh perusahaan-perusahaan transnasional yang semakin mencengkeram kekuasaannya di negara-negara berkembang. Keterbukaan ekonomi—serta regulasi yang mendukung terjalannya kerjasama antara pemerintah di negara berkembang dengan perusahaan-perusahaan di negara maju—telah membuat jumlah perusahaan transnasional yang melakukan ekspansi ke Asia semakin meningkat pesat. Pada awal 1990-an saja, sudah tercatat sekitar 37 ribu perusahaan transnasional yang mengontrol kurang lebih 200 ribu perusahaan lain yang melakukan kontrak kerja sama dengannya. Transaksi yang berlangsung di seluruh dunia dari praktik ekonomi neoliberal ini mencapai lebih dari US \$ 5 triliun (Ray Kiely, 1998), sementara jumlah pekerja yang terlibat di dalamnya mencapai 36 juta orang. Mayoritas karyawan yang memasuki pabrik-pabrik raksasa ini adalah perempuan muda, lajang dan hampir semuanya dibayar dengan upah yang rendah, karena perusahaan-perusahaan ini beranggapan bahwa mereka telah membuka lapangan kerja besar-besaran yang menyebabkan para perempuan yang berasal dari pedesaan dan pinggiran kota ini tidak menjadi pengangguran.

Persoalan lain yang dihadapi oleh perempuan dalam kaitannya dengan praktik ekonomi neoliberal ini adalah “perdagangan daging.” Istilah ini biasa digunakan untuk menyebut praktik-praktik perdagangan manusia, khususnya perempuan, dalam bentuk yang tidak menguntungkan mereka. Perempuan dianggap sebagai komoditi yang bisa dipertukarkan dengan uang, demi keuntungan pihak tertentu. Bentuk perdagangan perempuan ini bisa macam-macam, misalnya pengiriman buruh migran tanpa ada perlindungan yang cukup. Kecenderungan dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa pabrik-pabrik atau para keluarga di negara maju lebih suka mendatangkan pekerja perempuan dari luar negeri karena upah mereka yang murah dan ketidakberdayaan mereka menghadapi kasus-kasus ketidakadilan. Pekerja perempuan dari negara berkembang ini umumnya tidak rewel meminta bermacam tunjangan, serta tidak semua berani melakukan tindakan

hukum jika sang majikan melakukan tindak pelecehan atau kekerasan. Dalam kasus ini, tampak bagaimana pekerja perempuan hanya dianggap sebagai komoditas, bukan sosok manusia. Hal yang dianggap penting oleh pemerintah hanyalah devisa yang mereka peroleh, alih-alih turut mengangkat harkat perempuan dengan memperluas gerak mereka di sektor publik luar negeri. Sekarang ini tercatat lebih dari satu juta perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai buruh pabrik, perkebunan serta pembantu rumah tangga (*Media Kerja Budaya*, edisi 08/2002).³ Beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kriminalitas yang melibatkan para buruh migran didalamnya—baik sebagai pelaku maupun sebagai korban—perhatian beberapa aktivis sosial dan lembaga swadaya masyarakat terhadap isu buruh migran semakin besar (akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya).

Selain itu, "perdagangan daging" ini juga sering dikaitkan dengan penjualan perempuan-perempuan muda dalam industri seks. Perdagangan seks adalah serangan paling hebat dari dunia usaha global terhadap perempuan. Kebudayaan, nilai dan tatanan sosial jungkir balik karena para penguasa modal ini ingin mencari keuntungan dari tubuh perempuan. Bagi perempuan-perempuan di negara berkembang, tingkat kebutuhan yang semakin tinggi dan semakin sulitnya lapangan pekerjaan, telah memaksa mereka untuk menjual tubuhnya demi sesuap nasi. Pengerukan penguasa modal dari tubuh perempuan ini semakin dipermudah dengan berkembangnya industri pariwisata (turisme) yang dilandasi dengan mitos tertentu yang menyebutkan bahwa pariwisata tak bisa berkembang tanpa adanya bisnis perdagangan seks yang memadai di dalamnya. Salah satu contoh paling menonjol dari fenomena ini adalah kasus banyaknya perempuan Thailand (jumlahnya mungkin

³ Khusus di Malaysia saja, jumlah tenaga kerja Indonesia mencapai 600 ribu orang yang tercatat secara legal, sedangkan mereka yang datang ke sana secara ilegal jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang, dengan angka lebih dari 50 persen perempuan. Pada 2000, tercatat 650 kasus kriminal yang menyangkut TKI—92 yang bekerja sebagai pekerja seks di hotel dan restoran, 160 terbunuh, 35 terlibat pembunuhan, 37 terlibat perdagangan narkoba, 250 tak memiliki dokumen resmi.

mencapai ribuan orang setiap tahun) yang dikirim ke Jepang untuk mendiami rumah-rumah pelacuran.⁴ Mereka datang dengan visa turis atau paspor palsu, dan jika mereka menolak untuk melacurkan diri, mereka akan dikuasai lewat kekerasan, ancaman, perkosaan atau obat bius. Selain kehilangan masa depan dengan tinggal di rumah-rumah pelacuran—yang pasti membuat mereka berada pada posisi paling marginal dalam masyarakat—para perempuan muda yang terlibat dalam industri seks berkedok pariwisata ini juga dibayang-bayangi ancaman lain yang tak kalah mengerikan, yaitu virus HIV/AIDS. Mayoritas dari pengidap HIV di Thailand Utara adalah perempuan-perempuan yang tinggal di kawasan prostitusi, 60 hingga 70 persen di antaranya adalah gadis-gadis remaja (mulai dari yang berusia empat belas tahun) yang berasal dari desa-desa miskin di perbukitan (Matsui, 2002).

Sisi lain dari “perdagangan daging” adalah industri pornografi. Selebihnya, film, televisi, dan majalah berada di bawah tekanan untuk berkompetisi dengan pornografi, yang sekarang ini menjadi kategori media yang terbesar. Di seluruh dunia, pornografi secara umum menghasilkan 7 miliar dolar setiap tahun, lebih banyak dari kombinasi yang sah industri musik dan film. Film porno jumlahnya melebihi jenis film lain dengan perbandingan tiga banding satu, dan pemasukannya 365 juta dolar setahun di Amerika Serikat saja, itu berarti satu juta dolar setiap hari. Majalah porno di Inggris menjual 20 juta eksemplar per tahun dengan harga dua atau tiga poundsterling per eksemplarnya, yang berarti menghasilkan lebih dari 500 juta poundsterling setiap tahunnya. Industri pornografi di Swedia menghasilkan 300 hingga 400 juta kronon (mata uang Swedia) pertahun. Toko seks di sana menawarkan lebih dari 500 judul (film), dan sebuah kedai kecil menawarkan 20 hingga 30 judul film. Pada 1982, 500 ribu laki-laki di Swedia membeli majalah porno masing-

⁴ Jepang telah menjadi tujuan umum bagi para perempuan yang diperjualbelikan dalam perbudakan seks, karena industri seks di Jepang meningkat dalam skala yang fantastis dan meraih keuntungan sebesar lebih dari 4 triliun yen setiap tahunnya, setara dengan jumlah anggaran pertahanan nasional Jepang, atau 1 persen dari Produk Penghasilan Nasional (GNP).

masing satu per minggu, sementara pada 1983, setiap empat video yang disewakan di Swedia adalah video porno. Pada 1985, 13,6 juta majalah porno yang didistribusikan oleh distributor terbesar terjual di kedai-kedai kecil. Delapan belas juta laki-laki di Amerika Serikat setiap bulannya membeli total 165 majalah porno yang berbeda, yang secara umum nilainya berkisar hingga setengah miliar dolar per tahun. Satu dari sepuluh orang laki-laki Amerika membaca *Playboy*, *Penthouse*, atau *Hustler* setiap bulan (Wolf, 2000). Jadi bisa dilihat betapa alasan utama di balik pesatnya perkembangan industri pornografi adalah tingginya keuntungan yang bisa diambil pemilik modal dari penjualan tubuh-tubuh perempuan dalam bentuk imaji visual. Industri ini memasuki seluruh wilayah dunia, termasuk menyerang (meskipun secara tak langsung) perempuan negara-negara berkembang, meskipun kebanyakan konsumen pornografi di negara-negara ini masih mengandalkan masuknya produk-produk asing,⁵ mengingat kuatnya sensor masyarakat negara-negara berkembang terhadap persoalan seksualitas.

Dampak-dampak praktik ekonomi neoliberal terhadap perempuan tidak hanya dapat ditemukan pada sektor industri, perdagangan, pariwisata dan media massa saja. Francis Wahono (2003) mencatat bahwa alur penderitaan paling pekat dari Revolusi Hijau di bidang pertanian tergambar dari penderitaan para perempuan muda yang hidup di pedesaan. Pada awal 1980an, ketika Revolusi Hijau mencapai puncaknya, terjadi peminggiran petani yang sangat mengenaskan. Lahan-lahan yang dimiliki petani semakin sempit, biaya produksi untuk menanam hasil pertanian semakin membengkak, dan membuat orang semakin mudah menjual lahannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengapa perempuan terkena dampak yang paling parah? Karena para perempuan ini umumnya tidak mempunyai hak tanah serta tak

⁵ Di Indonesia sendiri, meskipun industri pornografi tetap tumbuh subur—salah satu contohnya bisa kita lihat dari perkembangan media cetak yang setelah jatuhnya Soeharto tampak begitu banyak majalah dan tabloid yang dengan terang-terangan menampilkan gambar perempuan dengan pose “menggoda”—tetapi bisa dikatakan para pelaku pers ini harus siap berhadapan dengan reaksi-reaksi masyarakat yang cukup keras untuk kasus-kasus ini.

memiliki harta apapun yang dapat dijadikan modal untuk keluar dari desa dan menggeluti bidang di luar pertanian. Para perempuan umumnya juga memiliki bekal pendidikan yang lebih rendah dibandingkan lelaki, sehingga lebih sulit bagi mereka mencari pekerjaan. Sistem patriarkhi yang masih dianut oleh masyarakat tempat mereka hidup hanya memberikan hak waris (terutama yang berbentuk hak rumah atau hak tanah) kepada anak-anak lelaki. Sistem yang sama pula yang menempatkan perempuan sebagai jenis kelamin kedua (*second sex*) sehingga hak mendapatkan pendidikan tidak diprioritaskan bagi mereka. Akhirnya, kebanyakan dari perempuan pedesaan ini terdampar di lokasi, menjadi buruh murah di pabrik-pabrik, atau merantau tanpa jaminan keamanan di negeri orang.

Konsumerisme Perempuan: Sisi Lain Praktik Ekonomi Neoliberal

Uraian-uraian di atas, sudah cukup memberikan penjelasan dan gambaran yang cukup memadai tentang bagaimana praktik ekonomi neoliberal memberikan sekian banyak dampak negatif terhadap perempuan. Bahkan bisa dikatakan, perempuan adalah korban paling bawah dari mereka yang berada di bawah. Mereka dikontrol oleh kekuatan-kekuatan besar yang berada di luar mereka; pemodal, negara, dan sistem masyarakat yang masih mengunggulkan keberadaan lelaki. Peminggiran perempuan adalah hal yang saat ini seperti niscaya.

Namun ada hal lain yang menarik dari keterkaitan antara praktik ekonomi neoliberal ini dengan perempuan. Sementara perempuan menjadi korban langsung dari tergusurnya kekuatan-kekuatan ekonomi lokal, di sisi yang lain, para perempuan ini dijadikan objek dari konsumerisme yang menjadi tumpuan pokok praktik ekonomi neoliberal ini—meskipun konsumsi sendiri, menurut Imam (2003), bukanlah hal yang sama sekali baru atau sesuatu yang khas milik kapitalisme, apalagi neoliberalisme. Lebih lanjut Imam menjelaskan bahwa konsumsi tak lain adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Namun demikian, konsumsi dan polanya sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai bentuknya yang

paling mutakhir sekarang ini. Penekanan amat besar terhadap peran konsumsi—ketakutan kapitalisme akan *underconsumption* dan *overproduction*—pada sisi kultural dan sosial mendorong tumbuhnya apa yang disebut sebagai konsumerisme.⁶

Konsumerisme yang bukan barang baru ini sangat sesuai dengan gerakan yang serentak mengarah pada pemujaan pasar (istilah lain: fundamentalisme pasar) Para pendukung praktik ekonomi neoliberal percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi, dan konsumsi saja yang tunduk pada hukum pasar, melainkan seluruh kehidupan (Wibowo, 2003). Relasi-relasi antar manusia, pola hubungan gender, sistem pendidikan, dan bidang-bidang lain turut menyesuaikan sistem-sistem, nilai-nilai dan norma-normanya agar tidak terlindas roda perubahan ini.

Berbeda dengan dampak-dampak marginalisasi yang dialami oleh perempuan dari kelas menengah bawah yang hidup di kampung miskin kota, daerah pinggiran atau pedesaan, dampak konsumerisme ini menyerang para perempuan dari kalangan kelas menengah ke atas. Menurut studi yang dilakukan Chalmers (seperti dikutip Gerke, 2000) keluarga-keluarga yang dapat menikmati gaya hidup kelas menengah ke atas jumlahnya mencapai 7 hingga 10 persen dari keseluruhan populasi, kebanyakan hidup di wilayah-wilayah perkotaan. Pasca krisis moneter, jumlah kelas menengah berkurang hingga 5 juta jiwa dari total penduduk sekitar 230 juta jiwa.⁷ Gerke sendiri melihat bahwa sebelum krisis melanda, sesungguhnya para anggota kelas menengah yang baru muncul ini masih berusaha untuk

⁶ Menurut Mike Featherstone (1991) istilah "konsumerisme" ini sendiri sekarang dipahami dalam dua pengertian yang berbeda secara ideologis. Yang pertama, istilah ini digunakan untuk menandai adanya perilaku yang pasif dan tidak kritis terhadap aktivitas konsumsi. Sejalan dengan pendapat ini, Robert H Imam (2003) menyebut konsumerisme sebagai suatu pola pikir dan tindakan dimana orang melakukan tindakan membeli barang bukan karena kebutuhan melainkan karena tindakan membeli itu sendiri dapat memberikan kepuasan kepadanya. Dalam pengertian yang kedua, istilah ini digunakan sebagai indikasi adanya sikap sadar-diri (*self reflexive*) terhadap aktivitas konsumsi.

⁷ Selain jumlah orang kaya yang makin sedikit (dan itu berarti jumlah orang miskin bertambah banyak) disebutkan pula dalam laporan Straits Times yang dikutip oleh Gerke bahwa pendapatan perkapita Indonesia menurun dari US \$ 1.300 pada Juli 1997 menjadi US \$ 400 pada pertengahan 1999.

"memapankan" kedudukannya dengan menerapkan gaya hidup yang berorientasi konsumsi (*consumption-oriented lifestyle*), dengan menemukan kesenangan-kesenangan baru dari aktivitas semacam berbelanja, olahraga, berwisata, mengonsumsi musik-musik Amerika atau menonton film-film Barat. Konsumerisme sebagai praktik kebudayaan mempengaruhi kehidupan hampir semua orang, membuat mereka berusaha hidup dalam kitaran semua hal yang menjadi simbol "modernitas" dan gaya hidup orang kota. Konsumsi terkait dengan gagasan tentang pembentukan identitas diri.

Merunut pendapat tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana keterkaitan antara konsumerisme dengan pembentukan identitas (ke)perempuan(an)? Selama ini perempuan begitu sering diidentikkan dengan (aktivitas) konsumsi, lebih khusus lagi, konsumsi massa (*mass consumption*). Dalam dunia iklan terlihat bagaimana segala jenis produk ditampilkan sebagai hal yang selalu mungkin dibeli oleh perempuan (dewasa), meskipun produk itu sendiri sebenarnya ditujukan untuk segmen lelaki atau untuk anak-anak. Iklan pasta gigi keluarga, atau sabun cuci, misalnya, dengan jelas menampilkan sosok perempuan sebagai "ibu bijak" jika mereka mampu memilih produk yang terbaik untuk keluarga. Dalam kasus lain, dalam dunia *fashion* misalnya, produk-produk *fashion* untuk perempuan berganti dalam periode yang jauh lebih cepat dan singkat dibandingkan produk *fashion* laki-laki. Toko-toko yang menjual pakaian perempuan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang menjual pakaian laki-laki. Pada 1999 ditemukan kenyataan bahwa selama satu tahun warga Amerika Serikat menghabiskan 8 miliar dolar untuk belanja kosmetik (yang sebagian penggunaanya adalah perempuan).⁸ Namun harus diingat bahwa ketika kegiatan berbelanja ini diidentikkan dengan perempuan, bukan kesan positif yang muncul. Kegiatan belanja perempuan selalu dianggap sebagai aktivitas bersenang-senang semata, yang menunjukkan pemborosan,

⁸ Daftar-daftar perbandingan semacam ini tentu saja akan semakin panjang jika kita memasukkan semua kebutuhan rumah tangga dalam kelompok produk belanja bagi perempuan. Perempuan melakukan aktivitas belanja mulai dari bahan makanan, bahan kebutuhan rumah tangga, pakaian, produk kosmetik, obat-obatan dan sebagainya.

ketidakmampuan perempuan mengelola keuangan dan hasrat perempuan yang berlebih terhadap benda-benda (dan dengan sendirinya, citra-citra yang dilekatkan dalam benda-benda tersebut). Menurut Luce Irigaray, feminis yang mencoba memadukan pendapat Lévi-Strauss dan mengadopsi Marx dalam melihat fenomena perempuan dalam konsumerisme ini, kunci untuk memahami aktivitas perempuan pada titik ini adalah pandangan terhadap perempuan sebagai komoditi, bukan sebagai seorang konsumen. Ada kecenderungan para pemegang modal untuk melakukan *fabrikasi* atas perempuan (Thornham, 2000). Para produsen sesungguhnya tidak pernah dengan sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan perempuan, dan justru sebaliknya, merekalah yang mengonstruksi apa yang kira-kira akan menjadi kebutuhan perempuan.

Berbeda dengan pendapat seperti di atas, yang lebih menampilkan suara-suara yang terkesan pesimis, Celia Lury (1996) memberikan uraian menarik untuk menjawab pertanyaan awal yang tersebutkan di atas, sekaligus menolak pandangan yang melihat perempuan melulu sebagai objek konsumerisme. Dunia periklanan dan pemasaran mengakui bahwa peran konsumen dibangun oleh peran feminin, dan secara tipikal perempuanlah yang melakukan kegiatan berbelanja. Bahkan 80 persen atau lebih keputusan konsumsi ditentukan oleh perempuan. Itu berarti perempuanlah yang sebenarnya membeli sebagian besar barang dan melakukan "pekerjaan" konsumsi. Namun Lury mempertanyakan pernyataan bahwa perempuan adalah murni pelaku konsumsi. Anggapan seperti itu, di mata Lury, tidak memperhitungkan kenyataan bahwa secara umum perempuan "melakukan sesuatu" sebelum akhirnya menikmati apa yang mereka konsumsi. Melakukan sesuatu ini pun, ternyata menunjukkan daftar yang panjang, pergi ke pasar, memilih bahan makanan terbaik untuk disajikan, baru kemudian mengolah bahan-bahan tersebut (singkatnya, memasak. Harus diingat bahwa memasak juga bukan pekerjaan yang mudah dilakukan). Wanita secara tipikal merupakan produsen barang dan jasa, sementara lelaki sebagai suami adalah konsumen atau pengguna akhir produk barang dan jasa tersebut (Lury, 1996). Dengan demikian, berangkat dari penjelasan Lury ini, perempuan berada dalam lingkaran konsumsi bukan sebagai pihak yang pasif begitu saja, melainkan pihak yang

justru secara aktif mengelola dan mengolah kembali barang-barang yang mereka konsumsi.

Perdebatan yang terjadi di kalangan para feminis tentang posisi perempuan dalam arus konsumerisme ini belum menemukan titik temu, apakah perempuan itu subjek atau objek? Apakah perempuan bersikap pasif atau aktif? Apakah budaya konsumen memberi ruang bagi perempuan untuk mengolah kembali citra dirinya atau hanya sekedar menjadi media pemenuhan kebutuhan perempuan atas hasratnya? Perbedaan pendapat ini akan menjadi semakin panjang jika kita dihadapkan pula pertentangan yang terjadi di antara para feminis dari negara-negara dunia ketiga dengan feminis dari dunia pertama. Di satu sisi, ada kelompok feminis dunia pertama yang terus menghasilkan penelitian-penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa para perempuan yang terlibat dalam aktivitas konsumsi justru mengalami peningkatan "status" karena pada masa lalu aktivitas konsumsi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga—misalnya menentukan perabot rumah tangga, berbelanja hiasan rumah—adalah aktivitas yang dilakukan lelaki. Radner (seperti dikutip Lury) menulis bahwa kegiatan berbelanja bukan lagi rekreasi ibu rumah tangga yang jenuh karena selalu dibebani kewajiban untuk menjelmakan kekayaan dan kesuksesan suaminya, melainkan telah menjadi sarana seorang perempuan untuk mengeksternalkan "harga diri" sesuai dengan miliknya sendiri. Sementara di sisi yang lain, feminis dunia ketiga menuduh para pemegang modal dan kaum kapitalis negara maju sebagai pihak-pihak yang menjual citra-citra palsu kepada perempuan di negara dunia ketiga, dan kemudian melalui industri periklanan berusaha membuat perempuan terobsesi untuk mendapatkan citra palsu tersebut. Mereka menambah lagi asumsi bahwa karena tingkat pendidikan perempuan di dunia ketiga masih cukup rendah, maka sulit bagi mereka untuk dapat membangun kesadaran bahwa apa yang tampak dalam iklan dan media massa tersebut adalah "konstruksi" semata, dan karenanya tidak usah berusaha untuk menjadi sosok yang sama dengan model-model tersebut. Salah satu contoh yang sering diajukan oleh kelompok feminis dunia ketiga ini adalah membanjirnya iklan produk-produk pemutih kulit, yang secara tidak langsung menunjukkan penjajahan "Barat" terhadap

perempuan “Timur” dalam kaitannya dengan konsep atau standar kecantikan. Iklan-iklan ini terus menerus mengonstruksi kesadaran bahwa perempuan yang cantik adalah perempuan yang berkulit putih. Ketika pesan ini sudah diterima oleh khalayak (perempuan) dalam skala yang luas, maka dengan cepat produk-produk pemutih kulit habis di pasaran.⁹ Ada beberapa contoh lain yang menunjukkan bagaimana produk-produk dari negara-negara maju ini menyerbu para perempuan dunia ketiga sembari menciptakan satu konsep citra dan identitas diri yang sifatnya semu.

Feminisme Pasca-kolonial: Sikap Gerakan Perempuan terhadap Neoliberalisme

Persoalan posisi perempuan sebagai korban dari praktik ekonomi neoliberal ini bukannya tidak mendapatkan perhatian dari para aktivis perempuan. Fenomena ini bahkan dengan cepat menimbulkan perdebatan tersendiri di kalangan aktivis dan beberapa organisasi perempuan tentang isu apa yang seharusnya menjadi arus utama (*mainstream*) dari gerakan perempuan pada dekade-dekade ini, khususnya di negara-negara berkembang.

Uraian Matsui yang didasarkan pada pengamatan dan pengumpulannya selama puluhan tahun dengan isu-isu perempuan Asia menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan di negara berkembang sekarang ini sudah mulai membuka mata terhadap kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan raksasa yang selama ini hadir di hadapan mereka sebagai pahlawan pemberi kerja, tak ubahnya seperti “bandit-bandit” pengeruk keuntungan yang tak pernah peduli dengan kehidupan mereka. Namun kesadaran yang muncul dari para perempuan ini tidak mudah untuk kemudian diterjemahkan menjadi aksi-aksi yang taktis dan strategis dalam

⁹ Dalam sebuah acara talkshow bertajuk “Perempuan Bicara” yang ditayangkan di Trans-TV setiap hari Sabtu pagi, pernah dibahas persoalan kulit putih yang menjadi standar kecantikan perempuan. Pada saat itu, salah seorang dokter ahli kecantikan yang menjadi narasumber menyatakan bahwa pasien perempuan yang datang dengan keinginan memutihkan kulit jumlahnya mencapai 70 persen disbanding mereka yang mengalami keluhan atau persoalan kulit lain yang berhubungan dengan penampilan.

menghalau pengaruh buruh praktik ekonomi yang menindas ini. Sejarah gerakan perempuan pada beberapa dekade terakhir, terutama sejak maraknya pembangunanisme di pelbagai penjuru negara berkembang menunjukkan bagaimana program-program peningkatan kesejahteraan bagi perempuan ini sering kali gagal dan kandas di tengah jalan.

Bahasan tentang perempuan dan pembangunan tentu saja bukan hal yang baru. Pada 1970-an telah muncul pemikiran akan perlunya kemandirian bagi perempuan atau laki-laki miskin agar pembangunan dapat dinikmati semua pihak. Dari sini, muncullah konsep yang disebut sebagai "perempuan dalam pembangunan" (*women in development/WID*). Konsep ini sekaligus menjadi kampanye bagi semua negara untuk lebih memperhatikan nasib perempuan yang selama ini termarginalkan, kemudian mengajak mereka untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagian besar ide, rumusan kebijakan, konsep dan solusi dari WID ini didasarkan pada paradigma modernisasi. Sedangkan yang menjadi kelompok sasaran WID adalah kalangan perempuan dewasa yang miskin secara ekonomi. Mereka ini diusahakan mendapatkan peran yang produktif dalam pembangunan, misalnya dengan memperkenalkan kepada perempuan ini teknologi yang tepat guna untuk dapat meringankan beban kerja perempuan. Namun dalam kenyataannya, program ini menemui banyak kegagalan.

Kegagalan yang muncul tidak saja disebabkan karena ketidakmampuan para aktivis atau pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan konsep WID ini untuk merumuskan masalah perempuan secara tepat dan kemudian memberikan solusi yang sesuai, melainkan juga dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme penentuan itu sendiri yang sifatnya terlalu *top-down*. Identifikasi persoalan selalu datang dari pihak atas (lembaga pemberi donor, konsultannya atau tim peneliti). Cara kerja yang umum digunakan adalah mengirim tim peneliti dengan dukungan ahli—yang dibayar mahal—untuk "mempelajari" keadaan perempuan di lokasi tertentu. Tim perumus kebijakan dengan dukungan tim ahli kemudian membuat program dari kalangan perempuan. Setelah rencana dan langkah-langkah selesai dirumuskan, kemudian para perempuan kampung, pekerja dan kelompok lainnya diundang untuk terlibat sebagai "kelompok

sasaran", dan diajari pelbagai macam ketrampilan, seperti menjahit, menyulam, dan lain sebagainya (*Media Kerja Budaya*, edisi 08/2002). Pada awal 1990-an, mulai muncul suatu gagasan baru "gender dan pembangunan" (*gender and development/GAD*) yang merupakan respon dan evaluasi terhadap pelaksanaan WID. Konsep baru ini mendasarkan diri pada anggapan bahwa keterlibatan perempuan dan laki-laki sama pentingnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Perbedaan yang selama ini dilekatkan pada lelaki dan perempuan pada dasarnya hanyalah konstruksi yang bisa diubah. Para perempuan dan komunitas pembangunan menjadi sadar bahwa kelemahan khusus program-program dan proyek masa lalu harus dihindari. Program-program dan proyek-proyek ini harus memenuhi kebutuhan perempuan dengan cara yang tidak memperkuat kembali ketimpangan gender yang ada. Program-program pembangunan gender yang strategis haruslah melibatkan pria dalam proses perencanaan serta penerapan agar mereka dapat turut serta mengubah ketimpangan-ketimpangan gender yang sedang berlangsung. Belakangan konsep GAD ini disempurnakan kembali dengan konsep *Gender Mainstreaming*, yang bertujuan mendukung perempuan dalam pembangunan dan berusaha memasukkan nilai-nilai perempuan ke dalam pembangunan tersebut (Hidajadi, 2001).

Pada Konferensi Perempuan IV yang berlangsung di Beijing 1995, secara tegas para partisipan mendukung konsep *Gender Mainstreaming* ini. Mereka menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu mempromosikan secara aktif rencana kebijakan dan program yang berperspektif gender. Sebelum pelbagai rencana tersebut dijalankan, harus ada semacam "gender watch" untuk memeriksa dan menganalisa pelbagai kebijakan dan program, serta akibat-akibatnya di lapangan, baik terhadap lelaki maupun perempuan.

Bagaimana konsep-konsep yang menjelaskan peranan perempuan dalam pembangunan tersebut akhirnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah saat ini gerakan-gerakan perempuan yang ada di negara dunia ketiga cukup mampu mengemban misi mulia untuk menyelamatkan perempuan dari desakan praktik ekonomi neoliberal yang selama bertahun-tahun membuat kondisi mereka semakin terpojok? Beberapa tulisan dalam

buku Yayori Matsui, *Perempuan Asia*, memberikan gambaran bagaimana perempuan-perempuan Asia yang menjadi korban langsung dari dibukanya jalur perdagangan bebas melakukan perlawanan dengan cara-cara alternatif, keluar dari jalur-jalur yang selama ini digunakan pemerintah untuk menyusun program dan kebijakan pembangunan bagi perempuan.

Salah satu gerakan yang diluncurkan oleh kaum feminis Asia adalah *Development Alternative for Women in New Era* (DAWN), yang diciptakan oleh kaum perempuan di Selatan, dan mulai dicetuskan sejak dilangsungkannya *Nairobi World Conference on Women*, pada 1985. DAWN berusaha mengejar "pembangunan yang manusiawi dan berswasembada melalui pemberdayaan perempuan". Di Konferensi Perempuan Internasional berikutnya, di Beijing, DAWN menyampaikan tiga strategi berikut: (1) menekan Bank Dunia dan TNCs (*Transnational Corporates*) untuk bertanggungjawab terhadap berlangsungnya globalisasi (2) mengubah negara-negara bagian agar menjadi lebih demokratis dan transparan (3) memperkuat masyarakat sipil secara domestik maupun internasional.

Kasus kedua yang menarik untuk diangkat dan diperbincangkan adalah *ISIS Manila Internasional*, sebuah jaringan media perempuan internasional yang bermarkas di Manila, Filipina. Organisasi ini menerbitkan *Remaking the Economy* pada 1995, yang berisikan sepuluh tesis dan usulan, terutama dari perempuan Asia. Organisasi ini menunjukkan bahwa "dalam sekian tahun belakangan ini, para pakar feminis dan peneliti, juga para pengacara dan perempuan di tingkat akar rumput telah mencetuskan perdebatan tentang kerangka ekonomi yang dominan. Mereka pernah mengimbuai penciptaan kerangka ekonomi baru yang memisahkan kemakmuran ekonomi dan emansipasi perempuan."

Dari Indonesia, dapat dimunculkan kisah tentang Yosepha Alomang, seorang perempuan Papua, yang sejak 1974 berjuang melawan Freeport McMoran, perusahaan tambang raksasa yang bermarkas di New Orleans dan beroperasi di Papua sejak 1967. Mama Yosepha menjadi saksi bagaimana tanah dan lingkungan tempatnya hidup dirusak begitu saja demi kepentingan ekonomi segelintir pihak. Perjuangannya melawan perusahaan raksasa itu menyebabkan ia ditahan sebanyak lima kali dan disiksa dalam kontainer perusahaan

tersebut. Selain melawan perusakan lingkungan di Papua, ia juga tampil sebagai pembela bagi perempuan-perempuan Papua yang tertindas oleh sistem patriarkhi.

Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para perempuan tadi menjadi hal yang mendapat perhatian khusus dari feminisme pascakolonial, yaitu salah satu aliran feminisme yang mencoba menjelaskan ide-ide dan aksi-aksi feminisme berdasarkan pengalaman Perempuan Dunia ketiga sendiri, lepas dari konstruksi para feminis barat yang telanjur mapan. Aliran feminis ini, selain mengkritik masyarakat kapitalis-patriarkhi, juga mengangkat masalah bagaimana ideologi dan praktik-praktik rasisme, kolonialisme, dan neoliberalisme yang secara meyakinkan ikut memberi kontribusi dalam terjadinya penindasan atas kalangan perempuan dunia ketiga (perempuan kulit berwarna). Mereka menandai adanya dua ciri utama globalisasi sebagai penyebab peminggiran perempuan, yakni hadirnya kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, dan budaya rekolonialisasi kontemporer, serta sebagai reaksi baliknya, muncul kekuatan-kekuatan fundamentalis keagamaan dan nasionalis di pelbagai tempat. Jika ingin berhasil dalam perjuangannya menegakkan hak-hak perempuan, terutama dalam membangun kesadaran perempuan menghadapi praktik ekonomi neoliberal, para feminis aliran pascakolonial ini harus menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan aliran feminis lainnya. Singkat kata, feminis aliran ini harus terlibat dan bahkan ikut mempercepat perkembangan gerakan perempuan di tingkat "akar rumput" untuk menghadapi kekuatan-kekuatan dominan yang ada. Mereka harus mengaitkan kegiatan-kegiatan lokal tersebut dengan kekuatan global, dan beraliansi dengan kelompok-kelompok perempuan "akar rumput" lainnya dalam rangka membentuk "jaringan perlawanan feminis transnasional" (Hidajati, 2001).

Hal lain yang menarik untuk dicermati dari gagasan feminisme pascakolonial adalah sikap para perempuan dunia ketiga sendiri yang menolak pendefinisian yang dilakukan perempuan-perempuan negara dunia terhadap diri mereka. Meskipun fakta dan kenyataan di lapangan menunjukkan adanya keterdesakan dan lemahnya posisi tawar perempuan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi yang dominan, para perempuan dunia ketiga ini mencoba

melakukan negosiasi ulang dan menolak menerima "penindasan" sebagai hal yang selalu melekat pada diri mereka. Pemikiran feminisme Barat selalu menunjukkan gagasan yang melihat peranan perempuan dan posisi mereka dalam kerangka politik dan ekonomi global, yang pada awalnya sudah berpotensi imperialis (dan karenanya, eksploitatif) terhadap masyarakat dunia ketiga, termasuk para perempuannya. Seringkali usaha yang dilakukan oleh para feminis Barat melalui pelbagai buku dan seri penelitian tentang perempuan dunia ketiga hanya merupakan usaha untuk mencari lebih banyak kasus perempuan yang "tidak berdaya" dan "tertindas" untuk membuktikan label mereka sendiri tentang perempuan dunia ketiga. Hal yang kiranya paling penting justru jarang sekali dilakukan: usaha untuk membongkar materi, sistem dan ideologi tertentu yang membentuk kelompok perempuan menjadi "tidak berdaya" dengan memperhatikan konteks sosial-politik-ekonomi yang ada.

Karenanya, yang sekarang ini dianggap sebagai agenda penting bagi para feminis dunia ketiga adalah eksplorasi dan usaha representasi pengalaman perempuan dunia ketiga yang dilakukan oleh mereka sendiri, dengan cara pandang mereka sendiri terhadap persoalan-persoalan ekonomi-politik-sosial global yang melingkupi mereka. Mengedepankan pengalaman-pengalaman sukses perempuan dunia ketiga dalam melawan dan memperkuat posisi tawar terhadap institusi-institusi dominan—seperti yang dilakukan Matsui dalam serangkaian penelitiannya itu—adalah salah satu cara strategis untuk membongkar kebisuan yang ada selama ini tentang pengalaman perempuan dunia ketiga. Salah satu contoh representasi yang dianggap cukup berhasil misalnya karya Maria Mies tentang perempuan pembuat renda di Nasapur, India. Studi ini berusaha menganalisis banyak industri rumah tangga dengan hati-hati, terutama kehidupan yang "ibu rumah tangga" memproduksi serbet untuk konsumsi pasar dunia. Melalui sebuah analisis yang rinci terhadap struktur industri renda hubungan produksi dan reproduksi, pembagian kerja atas dasar jenis kelamin, keuntungan dan eksploitasi, serta akibat menyeluruh dari pendefinisian perempuan sebagai "ibu rumah tangga yang tidak bekerja" dan pekerjaan mereka sebagai "kegiatan waktu luang", Mies menunjukkan tingkat eksploitasi dalam industri ini dan dampak sistem produksi tersebut terhadap kondisi

kerja dan hidup perempuan yang terlibat di dalamnya (Maria Mies via Mohanty, 1984). Para intelektual dan pemikir feminis perlu memperluas cakupan penelitiannya dari sekedar persoalan melihat wilayah-wilayah di mana perempuan didefinisikan sebagai korban, menjadi usaha untuk melakukan pembongkaran relasi kuasa dan potensi resistensi perempuan dalam melawan keterdesakan tersebut.

Bagaimana Masa Depan Perempuan?

Pasar ekonomi global adalah salah satu hal yang memunculkan kemelaratan hebat, tak hanya bagi perempuan, melainkan para warga dunia yang kalah dalam peperangan modal. Harapan akan kemakmuran dan kesejahteraan tampaknya akan semakin jauh, dan justru kenyataan-kenyataan yang berkebalikan yang muncul di hadapan kita. Praktik ekonomi ini makin memperlebar kesenjangan hidup antara masyarakat negara maju dan masyarakat negara berkembang, selain memunculkan dominasi yang luar biasa besar dari perusahaan-perusahaan raksasa, yang tak hanya mampu mempengaruhi politik-ekonomi di suatu negara, melainkan mengendalikan jalannya perkembangan dunia. Para perempuan miskin yang hidup di negara berkembang, sekali lagi, saat ini berada kondisi yang sungguh mengenaskan. Keadaan-keadaan yang semacam ini pada akhirnya menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan "anti-globalisasi", yang sekarang ini sudah semakin meluas ke pelbagai kalangan; gerakan buruh, organisasi petani, gerakan mahasiswa, aktivis lingkungan, intelektual dan kalangan feminis.

Lalu apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan perempuan? Beberapa yang terpenting bisa jadi adalah (1) memajukan dan memperjuangkan hak demokratis perempuan untuk mendorong gerakan menuju pembebasan perempuan (2) Menggalang solidaritas internasional untuk menentang prostitusi dan perdagangan seks, terutama yang melibatkan "sindikasi global" dengan kedok pariwisata (3) secara bertahap melakukan gerakan untuk mengubah struktur kekuasaan yang selama ini bersifat maskulin—sarat dengan kekerasan atau militerisme—dan memasukkan nilai-nilai keperempuanan yang lebih bersahabat (4) memperkuat jaringan organisasi perempuan dengan kelompok-

kelompok lain yang juga bekerja untuk menentang praktik ekonomi neoliberal.

Selain langkah-langkah di atas, masih ada banyak hal lagi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan perempuan khususnya, dan seluruh warga dunia umumnya dari praktik eksploitasi manusia yang sedang berlangsung sekarang ini. Namun tampaknya masih ada banyak hambatan yang menghadang gerakan perempuan menuju arah ini. Akan tetapi penulis percaya, bahwa selama masih ada harapan, dan sungguh bekerja untuk mewujudkannya, maka akan terbangun kekuatan. ***

Daftar Pustaka

- Bemmelen, Sita van. (1995). 'Gender dan Pembangunan.' Dalam T.O Ihromi (ed.). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Farid, Hilmar, dkk. (2002). 'Perempuan Bergerak,' *Media Kerja Budaya* edisi 08, 2002.
- Gerkey, Solvay (2000). 'Global Lifestyles under Local Conditions: the New Indonesian Middle Class.' Dalam Chua Beng Huat (ed.). *Consumption in Asia*. London dan New York: Routledge.
- Hidajadi, Miranti. (2001). 'Perempuan dan Pembangunan.' *Jurnal Perempuan*, edisi 17.
- Imam, Robert. H. (2003). 'Neoliberalisme: Era Baru dan Peradaban Pasar.' Dalam Wibowo, I dan Wahono, Francis (ed). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas.
- Kiely, Ray (1998). 'Transnational Companies, Global Capital and the Third World.' Dalam Ray, Kiely (ed). *Globalisation and the Third World*. London dan New York: Routledge.
- Lury, Celia (1998). *Budaya Konsumen*. Terjemahan Hasti T Champion, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thornham, Sue (2000). *Feminist Theory and Cultural Studies*. London: Arnold Publisher.
- Tjandraningsih, Indrasari (1997). 'Buruh Perempuan Menguak Mitos.' Dalam Abdullah, Irwan (ed). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Wahono, Francis (2003). 'Revolusi Hijau: Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi.' Dalam Wibowo, I dan Wahono, Francis (ed). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas.
- Walter, LaFeber (2002). *Michael Jordan dan Neo-Kapitalisme Global*. Terjemahan V. Didik Suryo Hartoko., Yogyakarta: Jendela.
- Wibowo. I. (2003). 'Pendahuluan.' Dalam Wibowo, I dan Wahono, Francis (ed). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas
- Whyte, Pauline dan Robert Orr Whyte (1982). *The Woman of Rural Asia*. Colorado: Westview.
- Yayori Matsui (2002). *Perempuan Asia: Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*. Terjemahan Ursula G. Buditjahya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.